PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh:

KUKUH PAKUAN DARMA PUTRA NPM. 1601120091

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS TRIDINANTI FAKULTAS EKONOMI PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

KUKUH PAKUAN DARMA PUTRA

Nomor Pokok/NIM

16.01.12.0091

Jurusan/Prog. Studi

: Akuntansi

Jenjang Pendidikan

: Strata 1

Mata Kuliah Pokok

: Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN

SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Pembimbing Skripsi

Tanggal Pembimbing

Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE., MM

NIDN: 0016035101

Tanggal Pembimbing II :

Martha Rianty N. SE. M.Si

NIDN: 0209039101

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

217/18/01/20

Dr. MSY.MIKIAL, SE., M.Si., Ak.CA, CSRS

OLT NIDN: 0205026401

NIDN: 0205026401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jika Lapar Makan, Jika Lelah Istirahat, Jangan Ragu Untuk Berhenti Sejenak. Karena Hidup dengan Sewajarnya Juga Berarti Meghargai Hidup.

Kupersembahkan kepada:

- Kedua Orangtua Saya Tercinta
- Saudara Kandung Satu-satunya
- Dosen Pembimbing yang Terhormat
- Keluarga Terkasih
- Teman dan Sahabat Seperjuangan
- dan Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan dan dorongan serta perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Dr.Ir.Hj. Manisah, MP, selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang
- 2. Dr.Msy. Mikial, SE.,M.Si,Ak.,CA.CSRS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
- 3. Mety Zuliyana.SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
- 4. Bapak Prof. Dr. Sulbahri Madjir, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Martha Rianty N. SE. M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini

5. Seluruh dosen pengajar, staf administrasi dan keluarga besar Fakultas

Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

6. Yang teristimewa Kedua Orangtuaku tersayang serta saudaraku yang selalu

senantiasa memberi semangat.

7. Sahabat-sahabat terbaikku Amel, Faiz, Fera, Dion, dan Rama yang sudah

memberikan dukungan.

8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2016.

9. Semua Pihak yang terkait yang telah mendukung yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga skripsi ini

selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan

terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari

berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua

pihak.

Palembang, Se

September 2020

Kukuh Pakuan Darma Putra

ν

DAFTAR ISI

		_	Halaman
		JL	
		SETUJUAN SKRIPSI	
		TO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PE	NGANT	'AR	iv
DAFTAR 1	ISI		vi
DAFTAR 7	TABEL.		ix
DAFTAR (GAMBA	AR	Х
ABSTRAK			xi
ABSTRAC	T		xii
RIWAYA	r HIDU I	P	xiii
PERNYAT	CAAN B	EBAS PLAGIAT	xiv
BAB I	PEN	DAHULUAN	
1.1	Latar I	Belakang	1
1.2	Perum	usan Masalah	9
1.3	Tujuar	n Penelitian	9
1.4	Manfa	at Penelitian	10
BAB II	PEM	IBAHASAN	
2.1	Kajian	Teoritis	11
	2.1.1	Pengertian Pajak	11
	2.1.2	Subjek Pajak	18
	2.1.3	Objek Pajak	19
	2.1.4	Reformasi Perpajakan	19
	2.1.5	Modernisasi Administrasi Perpajakan	22
	2.1.6	Sanksi Perpajakn	27
	2.1.7	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	
2.2	Penelit	tian Lain Yang Relevan	
2.3		gka Berpikir	

2.4	Hipoto	esis	41
BAB III	ME'	TODE PENELITIAN	
3.1	Temp	at dan Waktu Penelitian	42
	3.1.1	Tempat Penelitian	42
	3.1.2	Waktu Penelitian	42
3.2	Sumb	er dan Teknik Pengumpulan Data	42
	3.2.1	Sumber Data	42
	3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	43
3.3	Popul	asi, Sampel dan Sampling	44
	3.3.1	Populasi	44
	3.3.2	Sampel	45
	3.3.3	Sampling	46
3.4	Ranca	ngan Penelitian	46
3.5	Varial	bel dan Definisi Operasional	47
3.6	Instru	men Penelitian	49
3.7	Tekni	k Analisis Data	51
	3.7.1	Uji Statistik Deskriptif	51
	3.7.2	Uji Normalitas	51
	3.7.3	Uji Asumsi Klasik	52
	3.7.4	Uji Hipotesis	54
BAB IV	HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil	Penelitian	60
	4.1.1	Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Timur	60
	4.1.2	Hasil Uji Validitas	65
	4.1.3	Hasil Uji Reliabilitas	71
	4.1.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif	73
	4.1.5	Hasil Uji Normalitas	74
	4.1.6	Hasil Uji Asumsi Klasik	75
	4.1.7	Hasil Uii regresi Linear Berganda	79

	4.1.8	Hasıl Ujı Hipotesis	81
	4.1.9	Hasil Uji Koefisien Korelasi (r)	83
	4.1.10	Hasil Uji Koefision Determinasi	85
4.2	Pemba	ahasan	86
	4.2.1	Pengaruh Secara Parsial Modernisasi Sistem	Administras
		Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kep	atuhan Wajib
		Pajak Badan di KPP Paratama Palembang Ilir Ti	mur86
	4.2.2	Pengaruh Secara simultan Modernisasi Sistem	Administras
		Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kep	oatuhan Wajib
		Pajak Badan di KPP Paratama Palembang Ilir Ta	mur87
BAB V	KES	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesi	mpulan	89
5.2	Sara	n	89
DAFTAR I	PUSTA	KA	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Kontribusi Penerimaan Pajak Pada APBN2
Tabel 1.2	Kepatuhan Wajib Pajak Provinsi Sumatera Selatan4
Tabel 1.3	Tabel Kontribusi Wajib Pajak6
Tabel 2.1	Penelitian Lain yang Relevan
Tabel 3.1	Variabel dan Definisi Operasional47
Tabel 4.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas Variabel X166
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Variabel X268
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Variabel Y70
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas X372
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas X272
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas Y72
Tabel 4.8	Hasil Uji Statistik Deskriptif73
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 4.11	Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi78
Tabel 4.12	Hasil Uji Autokorelasi79
Tabel 4.13	Hasil Uji Regresi Linear Berganda80
Tabel 4.14	Hasil Uji Parsial (t)
Tabel 4.15	Hasil Uji Simultan (uji F)83
Tabel 4.16	Kriteria-kriteria Interprestasi Koefisien Korelasi
Tabel 4.17	Hasil Uji Koefisien Korelasi (r)
Tabel 4.18	Hasul Uji Koefisien Determinasi (R ²)85

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Grafik Pendapatan Negara	3
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	40
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	62
Gambar 4.2	Hasil Uji Heterokedastisitas	77

ABSTRAK

KUKUH PAKUAN DARMA PUTRA, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur (Dibawah Bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE., MM dan Ibu Martha Rianty N, SE. M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Modernsiasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Sampel penelitian sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif terdiri dari pengujian validitas, pengujian reabilitas, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi linear berganda, pengujian korelasi, pengujian determinasi, pengujian hipotesis F dan t. Hasil pengujian ini adalah sebagai berikut: pertama, Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak badan. Kedua, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

Kata Kunci: Modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

KUKUH PAKUAN DARMA PUTRA, The Effect of Modernization of the Tax Administration System and Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. (Under Guidance of Mr. Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE., MM and Ms. Martha Rianty N, SE. M.Si).

This study aims to determine how the influence of the Modernization of the Tax Administration System and Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance at the Tax Service Office Pratama Palembang Ilir Timur. The research sample was 100 people. The data collection technique used in this study was a questionnaire technique. The analysis technique used in this research is quantitative analysis consisting of validity testing, reliability testing, classic assumption testing, multiple linear regression testing, correlation testing, determination testing, hypothesis testing F and t. The results of this test are as follows: first, Modernization of the Tax Administration System in the Tax Service Office Pratama Palembang Ilir Timur affects corporate taxpayer compliance. Second, the Tax Service Office Pratama Palembang Ilir Timur.

Keyword: Modernization of the tax administration system, tax sanctions, taxpayer compliance

RIWAYAT HIDUP

Kukuh Pakuan Darma Putra, dilahirkan di Margorejo, 09 Mei 1997 dari Ayah Waki Jihantoro dan Ibu Minarsih anak pertama dari 2 bersaudara

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2009 di SDN 1 Watuagung, sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2012 di SMPN 1 Adiluwih dan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMK Ariya Metta Tangerang pada tahun 2015. Pada tahun 2016 saya memasuki fakultas ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Tridinanti Palembang.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Kukuh Pakuan Darma Putra

NPM

: 160.11.20.091

Jurusan

: Akuntansi

Judul

: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI

PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI

KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dengan peraturan yang ada.

Palembang, September 2020

Kukuh Pakuan Darma Putra

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu wujud dari kewajiban masyarakat yaitu dengan adanya kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak merupakan peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara.

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo 2016:4). Pada hakikatnya, pajak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari APBN. Pasalnya pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel Kontribusi pajak pada APBN periode 2015-2019 yang disajikan pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1

Kontribusi Penerimaan Pajak Pada APBN

Periode 2015-2019 (dalam triliun rupiah)

Uraian/Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
APBN	2.039,4	2095,7	2.080,4	2.220,7	2.461,1
Penerimaan Pajak	1.790,3	1.546,7	1.748,9	1.618,1	1.786,4
Kontribusi Pajak Pada ABN	87,79%	73,8%	84,07%	72,86%	72,59%

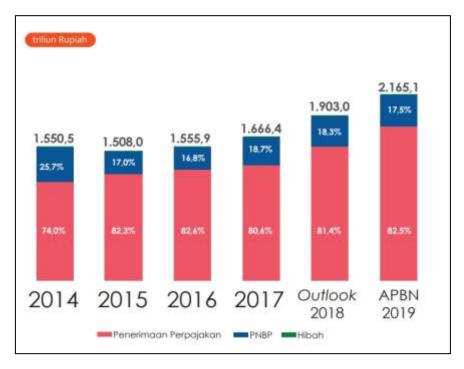
Sumber: APBN Republik Indonesia yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 kontribusi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rata-rata lebih dari 70%, yang berarti penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Direktorat Jendaral Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan segara melalui sektor pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Indonesia (Sari, 2016:7)

Pajak adalah alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan (Sari, 2016:38). Sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu budgetair, sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Hal ini mengakibatkan jumlah penerimaan pajak akan

menentukan jumlah anggaran negara, baik untuk pembiayaan rutin maupun untuk pembiayaan pembangunan. Kontribusi pajak dalam pendapatan negara juga terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1:

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Negara



Sumber: APBN Republik Indonesia tahun 2019

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan negara terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal terlihat dari observasi awal dari data kepatuhan wajib pajak Provinsi Sumatera Selatan. Tabel kepatuhan wajib pajak Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Provinsi Sumatera Selatan

Uraian/Tahun	2015	2016	2017	
Wajib Pajak Terdaftar	777.769	841.837	925.266	
Wajib Pajak Wajib SPT	489.351	508.321	383.832	
Realisasi SPT	276.426	312.764	264.070	
Persentasi Kepatuhan	59,77%	63,23%	71,37%	

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi SPT mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 48.694 namun persentasi kepatuhan pada tahun tersebut naik 8% dari tahun lalu yaitu mencapai 71,3%. Hal ini juga dibarengi dengan jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak SPT yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Hal ini didukung dengan beberapa penelitian terkait tentang kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Yang berarti sanksi pajak mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Astrina & Septiani:2019), (Rianty & Syahputra:2020).

Pada tahun 2020 penerimaan pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tercatat mencapai Rp15,42 triliun atau 97,68% dari target yang dipatok pada tahun 2019 senilai RP15,78 triliun. Capaian penerimaan tersebut tergolong baik karena di atas raihan nasional yang sebesar 84,49% pada tahun lalu. Tingginya realisasi

penerimaan pajak di dua provinsi itu tidak terlepas dari upaya pihak Ditjen Pajak (DJP) Sumsel dan Babel untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan waib pajak sebagai Warga Negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka Ditjen Pajak melakukan peningkatan terhadap *Good Governance* dan pelayanan prima (*Service Excellent*) dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut: 1) Struktur Organisasi, 2) *Business process* dan teknologi informasi dan komunikasi, 3) Manajemen sumber daya manusia, 4) Pelaksanaan *good governance*.

Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dapat dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Penerapan modernisasi perpajakan dapat dilihat dari penggunaan teknologi berbasis komputer sebagai sarana pelayanan administrasi pajak. Penggunaan *e-system* merupakan contoh pengaplikasian modernisasi administrasi perpajakan. Kontribusi penggunaan modernisasi administrasi perpajakan dapat dilihat pada Tabel 1.3:

Tabel 1.3

Tabel Kontribusi Wajib Pajak

Uraian/Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah Wajib Pajak	33.336.122	36.446.616	39.151.603	42.479.485
Jumlah pengguna E-SPT	710.709	1.101.101	1.458.518	1.573.012
Jumlah pengguna <i>E- Filing</i>	2.580.438	8.954.122	9.351.685	10.177.439

Sumber: Laporan tahunan DJP data diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel 1.3 wajib pajak yang menggunakan fasilitas *e-system* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan kesadaran wajib pajak untuk menggunakan teknologi informasi berbasis komputer mengalami peningkatan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak (Sari, 2016:269). Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksankan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Harti, 2015:28). Sanksi pepajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan ditaati (Mardiasmo, 2016:62). Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Putu Agustina & Niluh Supadmi, pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak yang dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Artinya, semakin tinggi penerapan sistem administrasi modern dan penerapan sanksi perpajakan di KPP Pratama Denpasar Timur maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin Tinggi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Irfan Kurniawan, pada tahun 2018 yang melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Magelang menghasilkan kesimpulan. Modernisasi administrasi dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Magelang.

Hasil berbeda didapatkan oleh M. Choiril, dkk pada tahun 2016 yang melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening. Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak

langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Lita Damayanti & Nik Amah pada tahun 2018 yang melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.

Berdasarkan penelitian di atas masih ada keterbatasan di setiap penelitian yang dilakukan berupa jumlah variabel yang terbatas, luas wilayah yang terbatas, dan jumlah koresponden yang terbatas dan masih terdapat perbedaan hasil penelitian terkait kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut dengan wilayah yang berbeda yakni KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan, dengan harapan mendapatkan hasil yang berbeda terkait kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan, dengan substansi yang dikembangkan terbatas pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai praktik reformasi administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur serta menelaah pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak Badan sebagai salah satu tujuan reformasi administrasi perpajakan dengan

judul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur?
- 2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan:

- Mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap wajib pajak badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap wajib pajak badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
- 2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
- Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Putu & Ni Luh Supadmi. 2016. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Bali: E-Jurnal Akuntasi Universitas Udayana.
- Anam, M. Choirul. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan kegiatan Usaha dan pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening. Semarang: Journal of Accounting.
- Astrina, Fenty & Chessy Septiani. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Palembang: BALANCE: Jurnal Akuntansi dan Bisnis.
- Dwi, Lita & Nik Amah. 2017. *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak*. Madiun: ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan.
- Dwimulyani, Susi & Fungsiawan. 2017. Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak 2016 dan Reformasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: Jurnal Universitas Widyatama.
- Fakultas Ekonomi. 2016. *Pedeoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti: Palembang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS*25. *Edisi Sembilan*. Semarang: Badan Peneliti Universitas Diponegoro.

- Harti, Dwi. 2015. *Administrasi Pajak: Paket Keahlian Akuntansi*. Semarang: Penerbit Elangga.
- Husnurrosyidah & Suhadi. 2017. *Pengaruh E-Filing, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. Kudus: Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan.
- Kurniawan, Irfan. 2018. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Magelang: Jurnal Ekobis Dewantara.
- Madiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, Nurulita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amanesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Yogyakarta: Akuntansi Dewantara.
- Rianty, Martha & Riza Syahputra. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Palembang: BALANCE: Jurnal Akuntansi dan Bisnis.
- Sari, Diana. 2016. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
- Sarunan, K. Widya. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Manado. Manado: Jurnal EMBA.
- Slamet Riyanto, Aglis. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Trijayanti, Noviana. 2017. Pengaruh Penerapan E-Filing dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Universitas Tridinanti: Palembang.
- Vivi, Herlina. 2019. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Wulandari, Dinda. 2020. *Penerimaan Pajak Sumsel Babel Capai 97,68 Persen*. Dalam https://sumatra.bisnis.com/read/20200115/533/1190538/penerimaan-pajak-sumsel-babel-capai-9768-persen diakses pada 11 Juli 2020.
- Zuhdi, M. Imam, dkk. 2019. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X. Bandung: Jurnal Ilmiah MEA.